

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jumlah kementerian negara dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta urgensi penghapusan batas jumlah kementerian terhadap struktur pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Penghapusan batasan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan di masa depan. Urgensi penghapusan batas jumlah kementerian didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, perubahan ini juga memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan pemerintahan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian merupakan langkah strategis untuk struktur pemerintahan terhadap dinamika kebutuhan negara, namun implementasinya memerlukan evaluasi berkala dan koordinasi yang kuat antar kementerian.

Kata kunci : Kementerian Negara - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 – Urgensi Penghapusan Batas Jumlah Menteri

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation of the number of state ministries in Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, as well as the urgency of eliminating the limit on the number of ministries in the government structure in Indonesia. The research method used is normative legal research, with a statutory approach, conceptual analysis and historical approach. The research results show that Law Number 61 of 2024 provides flexibility for the President to determine the number of ministries according to the needs of government administration. The aim of removing these limitations is to create a government that is more responsive to future changes and challenges. The urgency of eliminating the limit on the number of ministries is based on considerations of increasing effectiveness, efficiency and coordination in government administration. Apart from that, this change also allows the formation of new ministries based on certain government sub-affairs. This research concludes that eliminating the limit on the number of ministries is a strategic step to adapt the government structure to the dynamics of state needs, but its implementation requires regular evaluation and strong coordination between ministries.

Keyword : State Ministries - Law Number 61 of 2024 – The Urgency of Eliminating the Limit on the Number of Ministers